

**PERAN UNITED NATIONS DEVELOPMENT DALAM
MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
BIDANG PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN
YANG KUAT DI INDONESIA**

Agnes Indriani Hasanah¹ Hayat², Suyeno³, Taufiq Rahman Ilyas⁴ Afifudin⁵

Universitas Islam Malang

agneshasanah182@gmail.com hayat@unisma.ac.id suyeno@unisma.ac.id

taufiqrahman649@gmail.com afifudin@unisma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara yang digunakan untuk menganalisis implementasi program United Nations (Departemen Ekonomi dan Sosial Pembangunan Berkelanjutan) dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), yang merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh 193 negara anggota PBB pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR), yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi sistematis dari bukti-bukti yang terdapat dalam literatur ilmiah untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Hasil penelitian ini akan membantu Indonesia dalam mencapai SDGs di bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, yang merupakan tujuan nomor 16 dari 17 tujuan SDGs. Program UNDP di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan melalui berbagai inisiatif dan proyek yang sesuai dengan prioritas nasional dan daerah. Namun, seiring pelaksanaan program-programnya dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, seperti kompleksitas masalah di bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan, kurangnya sumber daya, dan ketidakpastian dalam pendanaan. Upaya terus dilakukan untuk mencari solusi inovatif dan mendapatkan dukungan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Kata kunci: UNDP, SDGs 16, Implementasi, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to explain the method used to analyze the implementation of the United Nations (Department of Economic and Social Sustainable Development) program in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), which is the global development agenda agreed upon by 193 UN member countries in 2015. The research method used is Systematic Literature Review (SLR), which involves the systematic identification, evaluation, and interpretation of evidence contained in scientific literature to answer specific research questions. The results of this research will help Indonesia achieve the SDGs in the fields of peace, justice and strong institutions, which is goal number 16 of the 17 SDGs goals. UNDP programs in Indonesia have an important role in supporting the achievement of the SDGs in the areas of peace, justice and institutions through various initiatives and projects that are in line with national and regional

priorities. However, as the implementation of its programs is faced with various challenges and obstacles, such as the complexity of problems in the fields of peace, justice and institutions, lack of resources and uncertainty in funding. Efforts continue to be made to find innovative solutions and obtain further support from relevant parties.

Keyword:s UNDP, SDGs 16, Implementation, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, agama, etnis, dan wilayah. Hal ini menimbulkan potensi konflik sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang memiliki sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, ketimpangan sosial ekonomi, radikalisme terorisme, dan lain-lain. Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas regional maupun global sebagai anggota aktif PBB. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk membangun perdamaian dunia melalui kerjasama internasional. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB memiliki komitmen untuk mewujudkan SDGs melalui berbagai strategi nasional dan daerah, termasuk dalam bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan. Salah satu strategi nasional Indonesia adalah mengembangkan kapasitas institusi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 menetapkan landasan hukum untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) di berbagai sektor, khususnya dalam bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan (Santoso dkk., 2023).

Program United Nations (Departemen Ekonomi dan Sosial Pembangunan Berkelanjutan) adalah program yang bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra internasional. Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan global yang disepakati oleh 193 negara anggota PBB pada tahun 2015, yang mencakup 17 tujuan dan 169 target untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi semua². Tujuan SDGs Bidang Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Kuat adalah tujuan nomor 16 dari 17 tujuan SDGs, yang mengatur tentang upaya untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (Brandon & Lombardi, 2010).

Program UNDP di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan melalui berbagai

inisiatif dan proyek yang sesuai dengan prioritas nasional dan daerah (Sari, 2015). Beberapa contoh inisiatif dan proyek tersebut antara lain: peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum; penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak; peningkatan partisipasi politik perempuan; penguatan sistem informasi publik; peningkatan kesejahteraan sosial; penanganan konflik sosial; peningkatan kerjasama antar lembaga publik; peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Nations, 2020b).

Namun, seiring pelaksanaan program-programnya dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Kompleksitas masalah di bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif. Kurangnya sumber daya dan ketidakpastian dalam pendanaan menjadi beberapa kendala utama yang dihadapi oleh UNDP. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk mencari solusi inovatif dan mendapatkan dukungan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait (UNDP, 2023).

Beberapa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Keragaman budaya, agama, etnis, dan wilayah di Indonesia menjadi sumber potensi konflik sosial yang perlu diatasi secara efektif untuk memastikan stabilitas sosial dan perdamaian yang berkelanjutan. Selain itu, tantangan penyelenggaraan pemerintahan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, ketimpangan sosial ekonomi, dan radikalisme terorisme, memerlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat integritas pemerintahan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Di samping itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun kapasitas, juga menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan implementasi program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Untuk mencapai tujuan SDGs di bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, Indonesia perlu fokus pada pembangunan masyarakat yang inklusif dan damai melalui pendekatan yang memperkuat dialog antarkelompok, mempromosikan penghargaan terhadap keragaman, dan meningkatkan partisipasi aktif semua warga dalam proses pembangunan. Selain itu, perlunya peningkatan akses keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan setiap individu memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif juga diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pembangunan nasional. Dengan langkah-langkah strategis yang terencana dan implementasi yang konsisten, Indonesia dapat meraih kemajuan yang signifikan dalam mencapai SDGs di bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat demi kesejahteraan dan stabilitas jangka panjang bagi seluruh masyarakatnya (Kementerian PPN, 2020).

Keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi internasional, seperti United Nations, menggambarkan komitmen yang tinggi terhadap upaya kolaboratif dalam mencapai tujuan global. Keikutsertaan Indonesia dalam Peacekeeping Operations (PKO) PBB menjadi bukti nyata dari peran aktifnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di berbagai misi PBB, seperti di Lebanon dan Kongo, mencerminkan kesediaan negara ini untuk berbagi tanggung jawab global dalam menangani konflik dan mengembangkan masyarakat yang stabil. Penting juga untuk mencatat bahwa kerjasama dengan berbagai lembaga dan mitra internasional, seperti UNDP, memberikan landasan kuat untuk implementasi kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Inisiatif bersama dengan organisasi-organisasi ini membantu mengatasi kompleksitas tantangan yang dihadapi, serta memberikan akses kepada Indonesia terhadap sumber daya dan pengetahuan global yang diperlukan untuk mencapai SDGs.

Selain itu, keberlanjutan pembangunan yang dikejar Indonesia dalam bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat juga mencakup upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, langkah-langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi bagian integral dari perjalanan mencapai SDGs. Dengan pemahaman mendalam terhadap kerangka kerja SDGs, terutama tujuan ke-16, artikel ini akan semakin menggambarkan upaya Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan memiliki lembaga-lembaga yang kuat untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diusulkan untuk menganalisis implementasi program United Nations (Departemen Ekonomi dan Sosial Pembangunan Berkelanjutan) dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat di Indonesia adalah Systematic Literature Review (SLR). Systematic Literature Review melibatkan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi sistematis dari bukti-bukti yang terdapat dalam literatur ilmiah untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu (Nightingale, 2009).

1. Perumusan Pertanyaan Penelitian:

Langkah pertama dalam SLR adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik. Dalam konteks ini, pertanyaan penelitian dapat berkisar pada efektivitas program UN dalam mencapai SDGs di Indonesia, terutama fokus pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.

2. Pencarian Literatur:

Pencarian literatur dilakukan secara sistematis menggunakan basis data yang relevan seperti jurnal ilmiah, laporan riset, dan publikasi resmi terkait implementasi program UN dan SDGs di Indonesia. Pencarian ini mencakup sumber-sumber yang dapat

memberikan wawasan mendalam tentang progres, hambatan, dan dampak dari program UN.

3. Seleksi Artikel:

Artikel-artikel yang ditemukan dinilai berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa artikel yang dipilih secara kualitatif relevan dengan topik penelitian dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap analisis.

4. Evaluasi Kualitas:

Setelah seleksi, dilakukan evaluasi kualitas literatur yang terpilih. Langkah ini mencakup penilaian terhadap validitas dan reliabilitas bukti-bukti yang ditemukan, memberikan bobot pada sumber-sumber yang memiliki metodologi penelitian yang kuat.

5. Analisis Data:

Proses analisis data melibatkan ekstraksi, penyusunan, dan analisis temuan-temuan dari literatur yang relevan. Pemahaman mendalam tentang implementasi program UN dalam mencapai SDGs di Indonesia berkembang melalui sintesis temuan-temuan ini.

6. Penyusunan Laporan:

Langkah terakhir adalah menyusun laporan hasil review literatur. Laporan ini mencakup sintesis temuan-temuan dan implikasi-implikasi bagi implementasi program UN serta pencapaian SDGs di Indonesia. Implikasi ini dapat berkaitan dengan perubahan kebijakan, rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, dan upaya nyata dalam meningkatkan efektivitas program.

Melalui menerapkan metode Systematic Literature Review, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi program UN di Indonesia dalam konteks SDGs. Dengan fokus pada bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, SLR memungkinkan penyelidikan yang mendalam terhadap bukti-bukti yang ada, membentuk landasan untuk evaluasi kebijakan dan rekomendasi ke depan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah melaksanakan peran tertentu. Dengan demikian, peran dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Sejalan dengan negara, organisasi internasional dapat melaksanakan dan memiliki sejumlah peran penting, yaitu:

Menyediakan sarana kerjasama di antara negara-negara dalam berbagai bidang, di mana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar maupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat di mana keputusan tentang kerjasama

dibuat, juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan. Melalui kerjasama ini, organisasi internasional memberikan platform di mana negara-negara dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan keahlian untuk mencapai tujuan bersama yang memberikan keuntungan bagi sebagian besar atau keseluruhan anggotanya. Selain itu, organisasi tersebut juga bertindak sebagai forum di mana keputusan-keputusan strategis tentang kerjasama internasional dibuat, dan menyediakan infrastruktur administratif yang diperlukan untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan tersebut menjadi tindakan nyata

Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah. Dalam konteks ini, organisasi internasional berfungsi sebagai mediator, fasilitator, atau penghubung antara negara-negara yang terlibat, memfasilitasi dialog, negosiasi, dan penyelesaian masalah. Dengan adanya jalur komunikasi yang terbuka dan terstruktur, organisasi internasional mempermudah akses untuk membahas isu-isu global yang kompleks dan memungkinkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran-peran ini menegaskan pentingnya organisasi internasional dalam menjaga stabilitas dan kerjasama di tingkat global, serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan damai di seluruh dunia (Sari, 2015).

Implementasi Program UNDP di Indonesia

United Nations Development Programme (UNDP) merupakan salah satu organisasi terbesar di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki fokus utama pada pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, UNDP telah beroperasi sejak tahun 1967, memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di berbagai sektor. Seiring lebih dari lima puluh tahun operasionalnya di Indonesia, UNDP telah menjadi mitra kritis dalam upaya mencapai SDGs. Kolaborasi erat dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadikan UNDP sebagai pemain kunci dalam progres pembangunan di Indonesia. Berbagai program dan proyek yang dilaksanakan oleh UNDP mencakup tingkatan dari nasional hingga lokal, memberikan solusi kontekstual terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia (UNDP, 2022).

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) melakukan tinjauan yang membahas “Memulai Agenda Pembangunan 2030: Mengatasi Ketimpangan dan Keberlanjutan,” dengan fokus pada kemajuan dan pencapaian berdasarkan Dokumen Program Negara (CPD) untuk periode 2016 hingga tahun 2020. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung agenda pembangunan global, termasuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diintegrasikan ke dalam visi pembangunan nasional dan dokumen perencanaan jangka

menengah Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 diterbitkan, yang menguraikan upaya negara dalam melaksanakan SDGs. Namun, Menteri menekankan bahwa memperkuat kerja sama di antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, mitra pembangunan, filantropi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil atas dasar rasa saling percaya sangat penting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan (Programme, 2021).

Direktur UNDP untuk Indonesia mengakui pencapaian yang signifikan, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dari 0,528 pada tahun 1990 menjadi 0,689 pada tahun 2015. Meskipun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama terkait kesenjangan desa-kota. Dalam konteks ini, UNDP menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, entitas sektor swasta, dan komunitas di seluruh tanah air. Pada acara tersebut, UNDP secara simbolis menyajikan laporan yang merangkum dukungan mereka di Indonesia, yang juga berfungsi sebagai produk pengetahuan yang mencakup pembelajaran dan praktik terbaik dari kolaborasi sebelumnya (Aulia, 2020).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, UNDP harus terus beradaptasi dengan dinamika perubahan di Indonesia. Dengan memperkuat inisiatif pada pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, dan tata kelola pemerintahan, UNDP dapat terus menjadi agen perubahan positif. Melalui kerjasama dan inovasi, UNDP berpotensi menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan SDGs di Indonesia.

Kontribusi Peran UNDP dalam pencapaian program SDGs bidang perdamaian Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Kuat di Indonesia.

a) Sustainable Development Goals (SDGs): Pilar Pembangunan Global

SDGs, sebagai tonggak pembangunan global, menetapkan agenda ambisius untuk mencapai keberlanjutan di berbagai dimensi kehidupan manusia dan lingkungan. Dengan 17 tujuan dan 169 target, sedang Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 mencanangkan 17 tujuan dengan 319 indikator capaian, SDGs memberikan kerangka kerja holistik yang mencakup aspek-aspek penting pembangunan, mulai dari pemberantasan kemiskinan hingga perlindungan lingkungan. Tahun 2015 menjadi momen bersejarah ketika 193 negara anggota PBB menyepakati tujuan-tujuan ini, menandakan komitmen bersama untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan.

b) Program UNDP di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, UNDP menjadi motor penggerak yang secara konsisten mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai serta tujuan SDGs. Program-program yang dirancang oleh UNDP di Indonesia secara khusus diarahkan untuk

mencapai tujuan-tujuan SDGs, merangkul diversitas aspek kehidupan dan masyarakat (NASIONAL, 2023).

UNDP di Indonesia tidak hanya menyuarakan relevansi terhadap setiap tujuan SDGs melalui program-programnya, tetapi juga mengukir dampak konkret dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Pencapaian statistik, seperti peningkatan akses pendidikan, penurunan tingkat kematian ibu, dan perbaikan indeks tata kelola pemerintahan, mencerminkan kesuksesan UNDP dalam berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. UNDP di Indonesia mengadaptasi strategi dan model pembangunan berkelanjutan yang berkelanjutan. Kolaborasi erat dengan pemerintah dan mitra lokal, penekanan pada pemberdayaan komunitas, dan pengintegrasian solusi berbasis teknologi dan inovasi menjadi poin-poin kunci yang membedakan UNDP sebagai pelaku penting dalam pembangunan berkelanjutan. sebagai contoh UNDP melalui program Hydrochlorofluorocarbons Phase-Out Management Plan (HPMP) berperan dalam mendorong pemerintah di tingkat kementerian untuk melindungi lapisan ozon dan penghapusan secara bertahap penggunaan bahan perusak ozo di indonesia (Farhani & Rudiany, 2020)

Komitmen tinggi Indonesia terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yang disampaikan oleh Menteri Bambang pada Rapat Koordinasi dengan Mitra Pembangunan. Indonesia telah memulai komitmen terhadap SDGs jauh sebelum dideklarasikannya pada September 2015, dengan mensinergikan 94 target SDGs ke dalam RPJMN 2015-2019. Komitmen ini akan ditingkatkan dengan mengintegrasikan lebih banyak target SDGs ke dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Pemerintah Indonesia mengadopsi paradigma baru yang didorong oleh SDGs, yang mengubah pendekatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Prinsip "No One Left Behind" dari SDGs mendorong partisipasi yang lebih luas dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam menyusun kebijakan pembangunan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kebijakan pembangunan tidak meninggalkan siapapun. Indonesia juga telah meraih beberapa capaian signifikan dalam implementasi SDGs, seperti mengarusutamakannya SDGs ke dalam RPJMN, menyusun pedoman untuk pelaksanaan SDGs, dokumen Rencana Aksi Nasional dan Daerah, serta melaporkan capaian SDGs di tingkat global. Capaian Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tidak dapat dipisahkan dari kerjasama yang erat dengan mitra pembangunan dan negara sahabatnya. Pada kesempatan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengungkapkan penghargaan kepada berbagai mitra pembangunan, termasuk Australia melalui DFAT, UNDP, UNICEF, dan ADB atas dukungan mereka terhadap Sekretariat SDGs. Dukungan dari Kedutaan Jepang melalui JICA dalam monitoring dan evaluasi, serta dalam penyusunan Voluntary National

Review (VNR) 2017 dan Rencana Aksi Nasional (RAN) serta Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk DKI Jakarta juga disoroti.

Kerjasama dari Kedutaan Jerman melalui GIZ dalam mendukung Sekretariat SDGs dan pendampingan pelaksanaan SDGs di empat provinsi, serta dukungan dari UNICEF dan UNFPA dalam pengembangan dan publikasi database kemiskinan anak dan pemuda, juga diapresiasi. Adapun EU diberi penghargaan atas dukungannya dalam pelaksanaan SDGs di tingkat daerah dan penguatan peran masyarakat dan pemerintah daerah melalui dukungannya kepada NGOs di Indonesia. Kontribusi FAO Indonesia dalam mendukung pengembangan indikator terkait nutrisi, serta dukungan dari UNRC dalam pengembangan website dan strategi komunikasi juga ditekankan. Sementara itu, Kedutaan Denmark melalui DANIDA diapresiasi atas kontribusinya dalam mengembangkan Roadmap Nasional Pelaksanaan SDGs 2030. Kedepannya, diharapkan adanya kerjasama yang berkelanjutan dan lebih strategis dalam bidang pengembangan database, penyusunan peta jalan, peningkatan kapasitas baik pemerintah maupun non pemerintah di tingkat nasional dan daerah, pengembangan dan pelaksanaan strategi komunikasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan termasuk pelaporan ke tingkat global melalui VNR 2019, serta upaya pencapaian rendah karbon. Diharapkan juga adanya dukungan dalam pengembangan indikator yang masih belum terdefiniskan dengan dukungan lembaga PBB pengampu, serta dukungan terhadap Sekretariat SDGs BAPPENAS. Menteri Bambang berharap agar dukungan dari DFAT, UNDP, Pemerintah Jerman melalui GIZ, JICA, EU, lembaga PBB, dan mitra pembangunan lainnya dapat berlanjut sehingga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dapat tercapai sesuai harapan bersama. (Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, 26/07/2018a).

Indonesia, bersama dengan Albania, Rwanda, Tunisia, dan Inggris, terpilih sebagai negara percontohan untuk menerapkan Target 16 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yang fokus pada Perdamaian, Keadilan, dan Tata Pemerintahan yang Baik (TPB/SDGs T16) dalam rentang waktu antara Juli 2014 hingga September 2015. TPB/SDGs T16 bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan inklusivitas dalam masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk memilih negara-negara sebagai proyek percontohan meliputi kapasitas negara untuk mengintegrasikan tujuan terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan berbagai target yang telah ditetapkan ke dalam proses perencanaan nasional, ketersediaan data dan indikator untuk mengukur pencapaian, serta kemampuan untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait TPB/SDGs T16. Setelah proyek percontohan dilaksanakan, dilakukan fasilitasi kerjasama, pertukaran pengetahuan, dan pengalaman antara negara-negara percontohan untuk menerapkan T16 di negara-negara lain.

Proyek percontohan ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya dalam tata kelola pemerintahan yang baik, serta memperkuat manajemen data, sistem perencanaan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan di tingkat nasional dan subnasional. Di bawah pimpinan BAPPENAS dengan keterlibatan erat dari pemangku kepentingan kebijakan dan dukungan UNDP, Pemerintah Indonesia memulai pelaksanaan proyek percontohan di tingkat nasional dan di DI Aceh dan DI Yogyakarta sebagai propinsi percontohan.

Tahapan-tahapan pelaksanaan proyek percontohan T16 meliputi:

1. Harmonisasi SDGs dengan proses perencanaan nasional dan prioritas pembangunan: Nawa Cita dan RPJMN: a. Menetapkan titik temu antara SDGs T16 dan tema pembangunan nasional untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) T16 dan 3 sub-Pokja berikut: a. Demokrasi dan Masyarakat Inklusif; b. Hak Asasi Manusia dan Keadilan; c. Institusi Inklusif dan Akuntabel: 2. Pokja ketiga bekerja untuk menerjemahkan target T16 menjadi indikator, terutama yang sudah terintegrasi ke dalam RPJMN untuk menyelaraskan agenda nasional dan global. Indikator diidentifikasi berdasarkan kapasitas penghasil data, sumber data, dan penghasil data. Penekanan diberikan pada penggunaan data yang sudah ada dan memanfaatkan data yang kurang dimanfaatkan untuk analisis Pembangunan; 3. Dari proses ini, teridentifikasi 40 indikator terkait T16 dan informasi kualitatif, terutama dari LSM; kapasitas pengumpulan dan penghasilan data bervariasi.

Dari pelaksanaan proyek percontohan, beberapa hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya transparansi data dan penggunaan data untuk pembuatan kebijakan. Selain itu, pentingnya kepemimpinan pemerintah yang kuat, partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, dan kebijakan berdasarkan bukti juga menjadi praktik terbaik yang dapat diterapkan (Bappenas, 2016).

Tantangan Implementasi Bidang Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Kuat

Pemberantasan Korupsi

Penanganan korupsi di Indonesia sejak tahun 2021 terus menjadi fokus, terutama dalam konteks pemulihan dari dampak pandemi covid-19. Menurut data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), tercatat 579 kasus korupsi yang dilaporkan di Indonesia sepanjang 2022, menandai peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya dengan 533 kasus tercatat. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa Indeks Harga Anti Korupsi mencatat jumlah kasus yang lebih rendah, yaitu 405 kasus. Penting untuk dicatat bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah kasus korupsi yang dilaporkan, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), yang merupakan indikator perilaku masyarakat dalam menentang korupsi, menunjukkan tren yang lebih positif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), IPAK nasional mencapai 3.93 pada tahun 2022, meningkat dari 3.88 pada tahun

sebelumnya, dalam skala 4. Peningkatan ini dapat diatribusikan kepada meningkatnya kesadaran anti korupsi di kalangan masyarakat dan upaya pelaku usaha untuk menentang praktik korupsi. Lebih lanjut, peningkatan IPAK juga terlihat secara regional, dengan tingkat perkotaan mencapai 3.96 pada tahun 2022, meningkat dari 3.92 pada tahun sebelumnya. Sementara di wilayah perdesaan, IPAK juga meningkat dari 3.83 menjadi 3.90 pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang semakin meningkat di berbagai lapisan masyarakat terhadap pentingnya melawan korupsi. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi di masa mendatang tercermin melalui strategi yang difokuskan pada penguatan sistem anti korupsi melalui optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset, serta pengembangan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Langkah-langkah ini mencakup aksi konkret dalam pencegahan korupsi yang terfokus pada partai politik dan pengawasan pembangunan Infrastruktur Kota Ibu Negara (IKN). Tidak hanya itu, pada bulan Desember 2022, pemerintah juga meluncurkan Aksi Pencegahan Korupsi untuk periode 2023-2024, yang bertujuan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara lebih efektif (NASIONAL, 2023).

Akses Pada Keadilan

Bantuan hukum dianggap sebagai sarana untuk memastikan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu. Penerima bantuan hukum (PBH) diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum (Bankum). Kebijakan terkait bantuan hukum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu atau kelompok-kelompok marginal, meski begitu bantuan hukum ini seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat atau kurang efektif (Fauzi & Ningtyas, 2018).

Total bantuan hukum yang disalurkan sepanjang tahun 2022 mencapai 12.912 kasus, yang disebar melalui 619 pos bantuan hukum di seluruh Indonesia. Persentase penerima bantuan hukum untuk kasus litigasi meningkat dari 81% pada tahun 2021 menjadi 84,91% pada tahun 2022, sementara untuk kasus non-litigasi meningkat dari 82% menjadi 82,18%. Hal ini menunjukkan peningkatan akses perlindungan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kebijakan ke depan dalam RKP 2023 akan menekankan perbaikan layanan bantuan hukum yang merata serta peningkatan layanan pemulihan hak-hak korban. Arah kebijakan tersebut mencakup ekspansi jangkauan akses terhadap keadilan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat, sambil memastikan perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban tindak pidana, terutama kelompok rentan. Upaya di masa mendatang, sebagaimana tercantum dalam RKP 2023,

akan berfokus pada perluasan akses terhadap keadilan, perbaikan dalam penyebaran layanan bantuan hukum di seluruh Indonesia, dan pemulihan hak-hak korban.

Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) memegang peranan yang vital dalam upaya menciptakan suasana aman dan adil bagi warga negara, termasuk dalam menjamin kebebasan individu, mengurangi kekerasan, dan mencegah konflik. Indonesia, dengan lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memiliki akreditasi A, terus berupaya mempertahankan pencapaian tersebut dalam promosi dan penegakan HAM di tingkat domestik, regional, dan internasional. Kebebasan pers juga merupakan elemen kunci dari kebebasan berekspresi yang diakui dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang memastikan hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan melalui berbagai media tanpa hambatan. Namun, serangan terhadap jurnalis dan organisasi media independen masih sering terjadi sepanjang tahun 2022. Data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan bahwa 97 jurnalis menjadi korban serangan, sementara 14 organisasi media menjadi sasaran.

Meskipun demikian, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) meningkat sebesar 1,86 poin dari 76.02 (2021) menjadi 77.88 (2022). Tingkat (IKP) yang tertinggi tercatat di Kalimantan Timur dengan skor 83.78 (2022), diikuti oleh Jambi dengan skor 83.68 (2022), dan Kalimantan Tengah dengan skor 83.23 (2022). Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan pers masih berada pada tingkat "cukup bebas" di daerah-daerah tersebut untuk mengekspresikan aspirasi dan melaporkan berita dengan bebas.

Peran Indonesia di Forum Internasional

Sesuai dengan amanat UUD 1945, salah satu tujuan pembangunan nasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya mewujudkan tujuan negara tersebut dilaksanakan melalui proses bertahap, terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Salah satunya melalui keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada organisasi Internasional (OI). Keanggotaan Indonesia pada OI meningkat menjadi 256 OI di tahun 2022 yang sebelumnya 200 OI di tahun 2021. Performa keanggotaan dan kontribusi beriringan dengan semakin meningkatnya peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di berbagai forum, di antaranya adalah terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM 2020-2022, dan ECOSOC 2021-2023. Untuk memastikan optimalisasi keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada OI, Pokja KKOI yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet akan melakukan evaluasi pada tahun 2024.

Perlindungan hak asasi manusia dan penguatan sistem keadilan merupakan bagian integral dari implementasi bidang ini. Program-program ini bekerja untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan, dan hak-hak dasarnya

diakui dan dilindungi. Oleh karena itu, implementasi ini telah menciptakan landasan hukum dan norma-norma yang mendukung perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

kompleksitas masalah yang dihadapi. Masalah sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Tantangan ini membutuhkan pemahaman mendalam terhadap dinamika masyarakat dan koordinasi antara berbagai pihak terlibat. Meskipun telah dicapai beberapa keberhasilan, sejumlah program mungkin terkendala oleh keterbatasan dana, personel, dan infrastruktur. Upaya untuk memperoleh dukungan tambahan dan menciptakan keberlanjutan finansial menjadi krusial, kemudian kurangnya partisipasi masyarakat dapat menjadi hambatan dalam merancang dan melaksanakan program-program ini secara efektif. Masyarakat yang tidak dilibatkan sepenuhnya mungkin tidak merasakan kepemilikan terhadap program-program tersebut, sehingga mengurangi dampak positif yang dapat dicapai.

SIMPULAN

Analisis menunjukkan bahwa peran UNDP dan implementasi SDGs di Indonesia memiliki dampak signifikan dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Meskipun telah ada keberhasilan, program-program ini menghadapi tantangan seperti pemberantasan korupsi, akses pada keadilan, pemenuhan hak asasi manusia, dan peran Indonesia di forum internasional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah konkret seperti penguatan sistem anti korupsi, perbaikan layanan bantuan hukum, penegakan hak asasi manusia, dan optimalisasi kontribusi Indonesia di forum internasional. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman budaya dan masalah seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan ketimpangan sosial ekonomi memerlukan upaya bersama untuk mencapai SDGs. Pemerintah Indonesia telah menetapkan landasan hukum untuk SDGs dan bekerja sama dengan UNDP dalam berbagai inisiatif. Tantangan utama meliputi konflik sosial, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan keterbatasan sumber daya.

Untuk mencapai tujuan SDGs di bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, Indonesia perlu fokus pada pembangunan masyarakat inklusif dan damai serta peningkatan akses keadilan merata. Keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi internasional seperti PBB menunjukkan komitmen tinggi terhadap kerjasama global. Keberlanjutan pembangunan juga mencakup upaya menjaga lingkungan. Dengan langkah strategis yang terencana, Indonesia dapat maju dalam mencapai SDGs demi kesejahteraan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: konsep, target, dan strategi implementasi*. Unpad Press.

- Aulia, S. H. (2020). *Peran United Nations Development Programme (Undp) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Bidang Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016–2019)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Bappenas. (2016). *Pelaksanaan Proyek Percontohan TPB/SDGs Target 16*. <https://sdgs.bappenas.go.id/pelaksanaan-proyek-percontohan-tpbsdgs-target-16/>
- Bappenas, & UNDP. (2017). *Indonesia dan UNDP Bekerjasama Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Mengatasi Ketimpangan dan Keberlanjutan*. <https://bappenas.go.id/berita/indonesia-dan-undp-bekerjasama-mendukung-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-mengatasi-ketimpangan-dan-keberlanjutan-PQCoc>
- Bappenas, & UNDP. (2018a). *Kolaborasi dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia*. <https://sdgs.bappenas.go.id/kolaborasi-dalam-mencapai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-tpbsdgs-di-indonesia/>
- Bappenas, & UNDP. (2018b). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi (2nd ed.)*.
- Brandon, P. S., & Lombardi, P. (2010). *Evaluating sustainable development in the built environment*. John Wiley & Sons.
- Farhani, M., & Rudiany, N. P. (2020). Keberhasilan UNDP melalui Program HPMP dalam Pembentukan Kebijakan Perlindungan Lapisan Ozon di Indonesia. *Indonesian Perspective*, 5(2), 159–182. <https://doi.org/10.14710/ip.v5i2.33959>
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. [1]
- NASIONAL, K. P. P. (2023). *Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) TAHUN 2023*.
- Nightingale, A. (2009). A guide to systematic literature reviews. *Surgery (Oxford)*, 27(9), 381–384. <https://doi.org/10.1016/j.mpsur.2009.07.005>
- Programme, U. N. D. (2021). *Laporan Tahunan UNDP Indonesia 2021*. [1]
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Kajian keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Internasional untuk Perdamaian Dunia di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 157–170. <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.147>
- Sari, S. (2015). Peran United Nations Development Programme (UNDP) Dalam Mewujudkan Millenium Development Goals (MDGs) 2015. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 4.
-